

LAMPIRAN**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK****NOMOR 40 TAHUN 2012****TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014****RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014****BAB I****PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.

Dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Dengan demikian, Renstra Tahun 2010-2014 yang disusun K/L harus mengacu kepada RPJM Nasional 2010-2014. Perpres No. 5 Tahun 2010 juga mengatur kewajiban K/L untuk menyusun Rencana Strategis 2010-2014 dengan menyusun visi dan misi K/L yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) K/L maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Renstra BPS Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJMN Tahun 2010-2014, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan

(*stakeholders*). Sesuai Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010, Renstra BPS Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional di bidang statistik untuk kurun waktu 2010-2014. Renstra BPS Tahun 2010-2014 menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik. Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan makin cepat disajikan merupakan tuntutan permintaan masyarakat dewasa ini. Kondisi yang seperti demikian menjadi tantangan bagi BPS dan para penyelenggara kegiatan statistik untuk selalu meningkatkan kualitas data dan informasi statistik sekaligus pelayanannya. Untuk itu, BPS menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan di bidang statistik yang tertuang dalam Renstra BPS 2010-2014.

B. Kondisi Umum

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi suatu pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

- (a) Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
- (b) Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan
- (c) Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Koordinasi dan kerjasama dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Jejaring tersebut merupakan kekuatan yang terus dikembangkan dalam rangka pembangunan nasional di bidang statistik.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan akan dilaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan nasional yang sejalan dengan RPJMN Tahun 2010-2014, seperti dituangkan dalam Buku II RPJMN Tahun 2010-2014, BAB XI. Penguatan sistem data dan informasi memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai dengan tahun 2009 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, yang dihasilkan melalui Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST), Sensus Ekonomi (SE), dan berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Semua indikator sosial-ekonomi tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

BPS juga memenuhi kebutuhan pemerintah yang tidak diagendakan sebelumnya, diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008, dan Pendataan Usaha Tani 2009 untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sejenisnya.

BPS menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakat melalui *press release* Berita Resmi Statistik (BRS) yang meliputi informasi statistik penting seperti inflasi, ekspor, impor, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, produksi padi dan palawija, angka kemiskinan, dan pengangguran. Selain itu, BPS juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik baik melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan.

C. Potensi dan Permasalahan

C.1. Potensi yang Dimiliki

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan SSN, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral yang dilaksanakan. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Dalam hal pengembangan SDM berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional setiap tahun, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga mempunyai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya. Kedua unit tersebut merupakan potensi yang terus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM. Di samping itu, BPS juga merupakan instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional pranata komputer.

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik.

Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pemerintah sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, secara nasional kepedulian masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS

semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJMN Tahun 2010-2014 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

Dengan cakupan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang besar, posisi Indonesia menjadi strategis bagi kepentingan internasional. Perhatian dunia terhadap Indonesia selalu merujuk kepada data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS. Beberapa negara di Asia-Pasifik dan Afrika juga banyak belajar dari BPS dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Kemampuan BPS dalam hal pengembangan statistik kemiskinan, sosial, ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah banyak diakui secara internasional.

Lembaga-lembaga internasional dibawah *United Nations* (antara lain UNDP, UNICEF, UNFPA, UNSD), *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), EuroStat, AusAid, USAid, JICA, *ASEAN Stat*, *Program Human Resources Development* (PHRD) Japan, *Korean Statistics* (Kostat) dan lain-lain juga memberi bantuan dalam pembangunan statistik di Indonesia.

Millennium Development Goals (MDG's) yang telah disepakati oleh sebagian besar negara termasuk Indonesia, menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan. Hal ini memperkuat kesadaran nasional akan pentingnya SSN yang terpadu, andal, efektif dan efisien.

C.2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data mencakup permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas, terutama di Wilayah Indonesia Bagian Timur, sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah. Keadaan ini juga membawa konsekuensi adanya beberapa Kabupaten/Kota yang belum mempunyai perwakilan BPS. Permasalahan internal lainnya adalah sarana dan prasarana TIK yang dimiliki BPS belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan jujur, yang menyebabkan kualitas data yang dihasilkan BPS belum optimal. Di samping itu, tidak tercapainya target sampel yang disebabkan oleh keengganan untuk dijadikan responden, menyebabkan *response rate* yang rendah terutama pada pelaku ekonomi. Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistics*), termasuk data mikro. Untuk memenuhi kebutuhan data mikro, BPS terkendala dengan Undang-undang

No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber informasi.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS.

Koordinasi antar instansi masih belum optimal, sehingga terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang pada gilirannya berakibat pada penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain :

- (i) *National Statistical Offices* (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
- (ii) Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
- (iii) Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.
- (iv) Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS

A. Visi BPS

Visi BPS 2010-2014 dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi melalui landasan pemikiran yang proaktif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 2010-2014 disepakati sebagai berikut:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”

BPS mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*).

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dengan berbagai cara agar pemanfaatannya bisa menjangkau secara luas, baik di dalam maupun di luar negeri.

B. Misi BPS

Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan nasional statistik Indonesia mencakup:

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien.

Misi pertama merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi, BPS memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauan kembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Misi kedua, SDM dan TIK menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS melalui STIS menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplemtasikan SSN secara efektif dan efisien.

Misi ketiga, BPS dalam menyelenggarakan statistik nasional mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi PBB, yang di antaranya bahwa BPS harus menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Misi keempat, BPS sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting dan strategis dalam mewujudkan visi BPS, yaitu sebagai pelopor penyedia data dan informasi statistik untuk semua.

Misi kelima, BPS sebagai penanggung jawab terlaksananya SSN, perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan efektif dan efisien.

C. Tujuan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan meliputi empat tujuan yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien;
3. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja; dan
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan selama kurun waktu 2010-2014, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tujuan pertama ini akan diperkuat oleh pilar pertama RB yaitu peningkatan kualitas data.

Tujuan kedua terkait dengan peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, BPS berperan sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh pilar keempat reformasi birokrasi yaitu Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Tujuan ketiga berupa Penguatan TIK serta sarana kerja; menjadi syarat penting dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan

arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh pilar ketiga RB yaitu Penguatan TIK serta sarana kerja.

Tujuan keempat terkait dengan peningkatan kapasitas SDM BPS, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini akan diperkuat dengan pilar kedua RB yaitu pembinaan dan peningkatan kualitas SDM.

Untuk terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) maka dipandang perlu untuk menetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Tujuan dan Target Pembangunan Statistik 2010-2014

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1.1.Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> kegiatan survei statistik; dan	90%	90%	90%	91%	92%
		1.2.Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya.	-	84%	85%	87%	89%
2	Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien	2.1.Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS.	85%	90%	92%	94%	96%
3	Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	3.1.Jumlah Satker yang mempunyai situs web yang terhubung secara <i>online</i> .	484	484	507	507	507

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan	4.1.Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1; dan	65%	65%	70%	75%	80%
		4.2.Penilaian KemenPAN-RB terhadap reformasi birokrasi BPS.	55	60	65	70	73

D. Sasaran Strategis BPS

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan SSN dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas”, adalah :

1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Dengan indikator sasaran :

- 1.1.1. Persentase penyajian/*release* data dan informasi bulanan statistik ekonomi makro pada hari kerja pertama setiap bulan;
- 1.1.2. Persentase penyajian/*release* data Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan hari kerja kelima setiap bulan kedua setelah triwulan berakhir;
- 1.1.3. Persentase pemasukan dokumen/ *response rate* dari kegiatan statistik perusahaan;
- 1.1.4. Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN; dan
- 1.1.5. Persentase konsumen data ekonomi yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya.

1.2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Dengan indikator sasaran :

- 1.2.1. Persentase penyajian/*release* data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester;

- 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen/*response rate* dari kegiatan statistik rumah tangga;
 - 1.2.3. Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai ISSN/ISBN; dan
 - 1.2.4. Persentase konsumen data statistik bidang sosial yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya.
- 1.3. Mengembangkan metodologi sensus dan survei
Dengan indikator sasaran :
 - 1.3.1. Persentase desain sampling untuk sensus dan survei bidang ekonomi dan sosial yang tepat guna;
 - 1.3.2. Persentase sampel terpilih yang mewakili; dan
 - 1.3.3. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien”. Adalah :
 - 2.1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik
Dengan indikator sasaran :
 - 2.1.1. Persentase penjabaran/*release* data dan informasi Indeks Tendensi Bisnis/Indeks Tendensi Konsumen pada hari kerja kelima setiap bulan kedua setelah triwulan berakhir;
 - 2.1.2. Jumlah model ekonomi dan sosial yang dikembangkan;
 - 2.1.3. Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi;
 - 2.1.4. Jumlah judul publikasi indikator dan analisis statistik; dan
 - 2.1.5. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli.
 - 2.2. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data
Dengan indikator sasaran :
 - 2.2.1. Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS;
 - 2.2.2. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data;
 - 2.2.3. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data; dan
 - 2.2.4. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap layanan data BPS.

2.3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Dengan indikator sasaran :

- 2.3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *Website* BPS;
- 2.3.2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS;
- 2.3.3. Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu;
- 2.3.4. Jumlah transaksi pembelian/permintaan data mentah oleh pihak luar (*raw data*); dan
- 2.3.5. Jumlah Publikasi Elektronik yang diupload di *Website*BPS.

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja”, adalah :

3.1. Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik

Dengan indikator sasaran :

- 3.1.1. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu;
- 3.1.2. Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan teknis dan manajemen yang dihasilkan; dan
- 3.1.3. Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli.

3.2. Peningkatan Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

Dengan indikator sasaran :

- 3.2.1. Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi; dan
- 3.2.2. Banyaknya penggunaan *Video Conference* untuk rapat teknis BPS Pusat dengan BPS Daerah.

3.3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya

Dengan indikator sasaran :

- 3.3.1. Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi yang baik; dan
- 3.3.2. Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik.

3.4. Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya

Dengan indikator sasaran :

3.4.1 Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai; dan

3.4.2 Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai.

4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: “Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan”, adalah :

4.1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dengan indikator sasaran :

4.1.1. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1;

4.1.2. Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon;

4.1.3. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu; dan

4.1.4. Persentase pegawai BPS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

4.2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Dengan indikator sasaran :

4.2.1. Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil audit.;

4.2.2. Jumlah fungsional Auditor;

4.2.3. Persentase Satker yang di audit;

4.2.4. Persentase Sakip yang dievaluasi; dan

4.2.5. Laporan Evaluasi hasil Audit

4.3. Penataan Kelembagaan dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan *Good Governance*

Dengan indikator sasaran :

4.3.1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (*Academic Paper*); dan

4.3.2. Penilaian KemenPAN-RB terhadap reformasi birokrasi BPS.

4.4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Dengan indikator sasaran :

- 4.3.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK;
- 4.3.2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh KemenPAN-RB; dan
- 4.3.3. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke Bappenas.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang statistik adalah meningkatkan kualitas statistik nasional, yaitu data yang dihasilkan memenuhi kriteria: akurat, relevan, tepat waktu/*timeliness*, mudah diakses/*accessibility*, koheren/*coherence* yang berarti konsisten antarsektor dan antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/*interpretability*.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah; (1) peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dan (3) peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat, meningkatnya kualitas data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat, meningkatnya manajemen survei, meningkatnya metodologi survei, meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, serta meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini baru terfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (*business process review*), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM, terkait dengan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah.

Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis kestatistikan, yaitu program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja institusi penyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan BPS

B.1. Strategi

Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS dalam rangka mendukung strategi dan arah kebijakan nasional. Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan BPS, selama lima tahun ke depan BPS perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain memenuhi kebutuhan perangkat TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnya *timeliness* penyajian data, kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data dan meningkatnya kualitas penyajian.

Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa mendatang memungkinkan munculnya berbagai tantangan dalam pembangunan statistik di Indonesia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan berdampak terhadap permintaan data dan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan, dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari swasta dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien, maka program pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik terpercaya yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kegiatan statistik di BPS dilakukan untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Kapasitas TIK di BPS saat ini juga belum seluruhnya sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, diseminasi data yang cakupan dan kuantitasnya semakin bertambah. Untuk mengimplementasikan SSN dapat dilakukan dengan memanfaatkan TIK dan sarana dan prasarana lainnya yang memadai.

Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang agak memprihatinkan khususnya di tingkat BPS Kabupaten/Kota. Dengan adanya STIS dan Pusdiklat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan SDM secara bertahap.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM, pada gilirannya berdampak kepada kondisi kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan BPS sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional, maka BPS menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses.

I. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari tujuan pertama. Strategi ini terdiri atas beberapa rangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran prioritas. Setiap strategi diawali dengan penyusunan Analisis Proses Ketatalaksanaan/*Business Process Analysis* (BPA) dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan/*Business Process Reengineering* (BPR). Adapun sasaran dan strategi-strategi tersebut diuraikan di bawah ini:

a) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengaplikasikan Sistem Neraca Nasional Indonesia berdasarkan *System of National Account* (SNA) 2008 untuk neraca-neraca pokok seperti Neraca Produksi (*Production Accounts*), Neraca Penerimaan dan Pengeluaran (*Generating of Income Accounts*), Neraca Kapital (*Capital Accounts*), dan Neraca Finansial (*Financial Accounts*) di BPS Pusat dan BPS Daerah sehingga terwujud data neraca nasional yang terbandingkan antarnegara;
2. Memperbaiki ketersediaan data dasar yang diperlukan bagi penerapan SNA 2008, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan);
3. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara statistik sektoral guna meningkatkan kualitas data dari instansi sektoral, berdasarkan gap analysis (analisis kebutuhan dan ketersediaan);
4. Memperbaiki sistem pengolahan data untuk SNA 2008;
5. Melakukan perubahan tahun dasar PDB dan PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 agar statistik PDB dan PDRB, serta pertumbuhan sosial dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan oleh BPS menjadi reliable;
6. Mengubah sistem pengumpulan data Survei Industri Besar/Sedang Tahunan yang semula dilakukan dengan pendekatan sensus menjadi dua pendekatan, untuk Survei Industri Besar melalui pendekatan sensus sedangkan Survei Industri Sedang melalui pendekatan survei sampel;

7. Melaksanakan Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) yang berkualitas;
 8. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas statistik pertanian;
 9. Meningkatkan kualitas statistik harga dengan menyelenggarakan Survei Biaya Hidup (SBH) dan menghitung Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani pada tahun 2012, serta menyempurnakan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik harga;
 10. Membangun statistik harga produsen;
 11. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Ekspor-Impor;
 12. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Konstruksi;
 13. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Pertambangan dan Energi;
 14. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Keuangan;
 15. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Pariwisata;
 16. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 17. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Perdagangan Dalam Negeri;
 18. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Perhubungan;
 19. Memperbaiki response rate survei-survei bidang ekonomi; dan
 20. Memperbaiki sistem pengolahan data survei berbasis perusahaan maupun rumah tangga.
- b) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sensus Penduduk 2010 yang berkualitas;
2. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Demografi;
3. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS);
4. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS);

5. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Upah dan Struktur Upah;
6. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Kemiskinan;
7. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi Statistik Ketahanan Sosial; dan
8. Memperbaiki *response rate* survei-survei bidang sosial.

c) Peningkatan metodologi sensus dan survei

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan/usaha;
2. Memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik;
3. Menerapkan desain sensus dan survei yang optimal; dan
4. Memperbaiki metode pengumpulan data dan *monitoring/pemantauan*.

II. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari tujuan kedua. Rangkaian aktivitas dari sasaran strategis ini adalah :

a) Peningkatan dan pengembangan analisis statistik

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas statistik lintas sektor;
2. Meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor;
3. Membangun Sistem Manajemen Kualitas Total; dan
4. Menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik.

b) Peningkatan hubungan dengan pengguna data

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kepuasan pelanggan;
2. Memperbaiki kemitraan dengan penyedia data; dan
3. Memperbaiki komunikasi dengan pengguna dan penyedia data.

c) Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS;
2. Memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik); dan
3. Meningkatkan penggunaan SiRusa, kompilasi metadata dalam kerangka Sistem Rujukan Statistik.

III. Strategi Pencapaian Tujuan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi kedua BPS yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, maka dirumuskan strategi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka penguatan sistem basis data. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS merumuskan beberapa strategi pembangunan arsitektur dan kerangka kerja teknologi informasi komunikasi dan manajemen informasi melalui serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

a) Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan komunikasi data; dan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya tenaga fungsional pranata komputer tingkat ahli.

b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK secara umum; dan
2. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja.

c) Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana TIK serta sarana dan prasarana kerja lainnya

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun standardisasi TIK (TIK arsitektur, prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak);
2. Membangun dan merenovasi gedung kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jumlah SDM;
3. Membangun dan merenovasi rumah dinas yang layak huni sesuai kebutuhan organisasi; dan
4. Mencukupi kebutuhan kendaraan operasional lapangan dalam rangka mempercepat proses kegiatan statistik.

IV. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari misi BPS yang kesatu, kedua dan kelima. Misi kesatu BPS yaitu memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. Misi kedua BPS yaitu menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. Misi kelima BPS yaitu meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur BPS.

Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM serta pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM dan penataan kelembagaan merupakan bagian strategis dalam pembangunan statistik nasional lima tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS merumuskan beberapa strategi untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia dan penataan kelembagaan, yang terdiri atas serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

a) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan untuk kondisi SDM BPS;

2. Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang;
 3. Memperbaiki perilaku individu dalam bekerja (code of conduct) untuk setiap aparatur BPS;
 4. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi kepegawaian;
 5. Membangun kebijakan dan prosedur pengembangan SDM;
 6. Memperbaiki penerimaan dan penempatan SDM pada semua level, baik di Pusat maupun Daerah;
 7. Membangun perencanaan karir;
 8. Membangun sistem informasi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan SDM;
 9. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara protokoler, hukum, dan kehumasan;
 10. Meningkatkan kualitas pendidikan STIS; dan
 11. Meningkatkan efektivitas Pusdiklat
- b) Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*
- Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mereviu dan mengamandemen UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik diikuti dengan perubahan terhadap peraturan perundangan pelaksanaannya;
 2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarunit di BPS Pusat dan antara BPS Pusat dengan BPS Daerah, serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan BPS yang berkualitas;
 3. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan dan Rekayasa Ulang Proses Ketatalaksanaan kelembagaan BPS;
 4. Melakukan reorganisasi berdasarkan kondisi lingkungan kerja di masa yang akan datang;
 5. Menyesuaikan dan memperbaiki kerangka hukum dan peraturan untuk mendukung administrasi kegiatan statistik;
 6. Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya kerja BPS;
 7. Membangun Sistem Perencanaan Sumber Daya Terpadu;
 8. Membangun sistem manajemen dokumen; dan
 9. Memperbaiki proses pengambilan keputusan strategis dan

peningkatan proses arus informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi keuangan; dan
2. Melaksanakan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi program dan kegiatan BPS secara efektif.

d) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun peraturan pengawasan dan pemeriksaan internal BPS;
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS secara intensif;
3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS; dan
4. Membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru, efektif dan efisien.

B.2. Arah Kebijakan

Sebagai tindak lanjut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Nasional sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dasar dengan cara sensus, survei dan kompilasi administrasi sesuai dengan yang tercantum pada pasal 11 UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus yang termaktub pada pasal tersebut adalah Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Penyelenggaraan Sensus merupakan prioritas nasional dalam menyediakan statistik dasar terkait demografi dan kependudukan, sektor pertanian dan sektor ekonomi sebagai landasan pengambilan keputusan atau landasan penyusunan kebijakan pemerintah.
- b. Melakukan reviu terhadap UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No. 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan

statistik sektoral yang andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoral seharusnya seiring dengan amanat PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi pelaksanaan PP No. 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatan perangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas BPS daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi dan implementasi PP No. 38 Tahun 2007.

- c. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu.
- d. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional.
- e. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terutama ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang disajikan.
- f. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

- g. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional.. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan SSN terpadu.
- h. Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan dan disajikan. SDM yang berkualitas akan menghasilkan data dan informasi statistik yang bermutu tinggi.
- i. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data.
- j. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang statistik di berbagai lembaga tersebut belum mempunyai pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS mencakup fasilitasi terhadap tenaga-tenaga fungsional statistisi maupun pranata komputer pada instansi-instansi sektoral, baik di tingkat instansi pusat maupun perangkat daerah.
- k. Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti *notebook/laptop* untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.

C. Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, (iii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BPS bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah. Program ini diarahkan untuk memperoleh penilaian BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian bagi laporan keuangan BPS.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di BPS Pusat. Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (pusat). Sedangkan untuk Program Generik, pada setiap Satuan Kerja Eselon II BPS Provinsi disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi.

Demikian pula bagi BPS Kabupaten/Kota disediakan Program Teknis dan Program Generik yang sama dengan BPS Provinsi.

Dari 26 Kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit Eselon II BPS Pusat, ditentukan enam prioritas kegiatan. Penentuan prioritas didasarkan kepada:

- (i) Amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni penyelenggaraan Sensus, meliputi Sensus Penduduk 2010, Sensus

Pertanian 2013 dan persiapan Sensus Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2016.

- (ii) Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional, meliputi kegiatan statistik berskala besar dan lintas sektor: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Nasional dan Regional, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumah tangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Penyediaan dan Pengembangan Data Kemiskinan, Penyediaan dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Industri Besar/Sedang, Survei Biaya Hidup (SBH) dan Survei Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani 2012, serta Sensus Potensi Desa 2013.

Dalam perkembangannya di tahun 2012 ini dan seterusnya, penyelenggaraan sensus BPS telah ditetapkan sebagai Kegiatan Prioritas Nasional. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga.

Secara lengkap hubungan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Badan Pusat Statistik 2010-2014 disajikan pada Tabel 2. Tabel 3 menyajikan indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan fokus prioritas dengan target pencapaiannya pada 2010 dan 2014 untuk. Tabel 4 menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2010-2014.

Tabel 2. Hubungan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Badan Pusat Statistik 2010-2014

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua	1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptak	1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Dengan Indikator: 1.a. Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i>	1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Indikator sasaran : 1.1.1. Persentase penyajian/ <i>release data</i> dan informasi bulanan	a. Menyelenggarakan statistik dasar dengan cara sensus survei dan kompilasi administrasi sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang	1. Teknis PPIS 2. Genetik DMPT TL PSPA PPAA	Kegiatan Prioritas dalam Program PPIS: <u>Kegiatan</u> : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan <u>Fokus Kegiatan</u> :

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<p>an insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;</p> <p>3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan</p> <p>5. Meningkatkan</p>	<p>kegiatan survei statistik; dan</p> <p>1.b. Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya.</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien</p> <p>Dengan Indikator:</p> <p>2.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS;</p> <p>3. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja</p> <p>Dengan Indikator:</p> <p>3.a. Jumlah Satker yang</p>	<p>statistik ekonomi makro pada hari kerja pertama setiap bulan;</p> <p>1.1.2. Persentase penyajian/ <i>release</i> data Produk Domestik Bruto Triwulanan hari kerja kelima setiap bulan kedua setelah triwulan berakhir;</p> <p>1.1.3. Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> dari kegiatan statistik perusahaan ;</p> <p>1.1.4. Jumlah judul publikasi statistik ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN; dan</p> <p>1.1.5. Persentase konsumen data ekonomi yang merasa</p>	<p>Statistik pasal 11;</p> <p>b. Melakukan reviu terhadap UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan di daerah;</p> <p>c. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran.</p> <p>d. Mewujudkan</p>		<p>- <i>Sensus Pertanian 2013 (ST2013)</i></p> <p><u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga Fokus</p> <p><u>Kegiatan :</u> - <i>Survei Biaya Hidup (SBH 2012)</i> - <i>Penyempurnaan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2012</i></p> <p><u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri Fokus</p> <p><u>Kegiatan :</u> - <i>Persiapan Sensus Ekonomi</i></p> <p><u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi</p>

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien.	<p>mempunyai situs web yang terhubung secara online.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan Dengan Indikator:</p> <p>4.a. Persentase pegawai BPS berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I; dan</p> <p>4.b. Penilaian KemenPAN-RB terhadap reformasi birokrasi.</p>	<p>terpenuhi kebutuhan datanya.</p> <p>1.2.</p> <p>Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu</p> <p>Dengan indikator sasaran :</p> <p>1.2.1. Persentase penyajian/ <i>release</i> data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester;</p> <p>1.2.2. Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> dari kegiatan Statistik Rumah tangga;</p> <p>1.2.3. Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan</p>	<p>kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);</p> <p>e. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi;</p> <p>f. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna;</p>		<p><u>Fokus Kegiatan :</u></p> <p>- Penyusunan Statistik Neraca Regional</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <p>Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan</p> <p><u>Fokus Kegiatan :</u></p> <p>- Sensus Penduduk (SP) 2010</p> <p>- Persiapan Supas2015</p> <p>- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <p>Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat</p> <p><u>Fokus Kegiatan :</u></p> <p>- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)</p>

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>an Rakyat yang mempunyai ISSN/ISBN; dan</p> <p>1.2.4.Persentase konsumen data sosial yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya.</p> <p>1.3Mengembangkan metodologi sensus dan survei Dengan indikator sasaran :</p> <p>1.3.1.Persentase desain sampling untuk sensus dan survei bidang ekonomi dan sosial yang tepat guna;</p> <p>1.3.2.Persentase sampel terpilih yang mewakili; dan</p> <p>1.3.3.Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir.</p>	<p>g. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional ;</p> <p>h. Memelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik;</p> <p>i. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik;</p> <p>j. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan</p>		<p><u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial Fokus Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Potensi Desa (Podes) - Pendataan Program Perlindungan Sosial(PPLS) <p>DMPTTL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program Kegiatan dan Anggaran • Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan • Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawain • Pelayanan Publik, Hubungan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>2.1. Meningkatkan dan Mengembangkan analisis statistik Dengan indikator sasaran :</p> <p>2.1.1. Jumlah model ekonomi dan sosial yang dikembangkan;</p> <p>2.1.2. Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi;</p> <p>2.1.3. Jumlah judul publikasi indikator dan analisis statistik; dan</p> <p>2.1.4. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli.</p> <p>2.2. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Dengan indikator sasaran:</p> <p>2.2.1. Banyak</p>	<p>kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta; dan</p> <p>k. Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti <i>notebook/laptop</i> untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei</p>		<p>Masyarakat, dan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara • Pelayanan Internal Perkantoran dan Kepegawaian • Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) • Operasional Perkantoran lainnya (Kegiatan Lintas Biro) • Biro Umum (di luar PSPA Pusat) • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>nya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS;</p> <p>2.2.2.Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data;</p> <p>2.2.3.Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data; dan</p> <p>2.2.4.Persentase konsumen yang merasa puas terhadap layanan data BPS.</p> <p>2.3.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik</p> <p>Dengan indikator sasaran :</p> <p>2.3.1.Jumlah pengunjung</p>			<p>Teknis Lainnya BPS Kabupaten /Kota</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Pusat • Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota <p>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabili

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>Website</i> BPS;</p> <p>2.3.2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS;</p> <p>2.3.3. Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu;</p> <p>2.3.4. Jumlah transaksi pembelian/ permintaan data mentah oleh pihak luar (<i>raw data</i>); dan</p> <p>2.3.5. Jumlah publikasi elektronik yang diupload di <i>website</i> BPS.</p> <p>3.1. Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik Dengan indikator</p>			<p>tas Inspektora t I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektora t II • Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektora t III

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>sasaran :</p> <p>3.1.1.Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu;</p> <p>3.1.2Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan teknis dan manajemen yang dihasilkan; dan</p> <p>3.1.3.Jumlah fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli.</p> <p>3.2.Peningkatan Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah</p> <p>Dengan indikator sasaran :</p> <p>3.2.1.Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi;</p>			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>dan</p> <p>3.2.2. Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik.</p> <p>3.3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya</p> <p>Indikator sasaran :</p> <p>3.3.1. Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi yang baik; dan</p> <p>3.3.2. Banyaknya penggunaan <i>Video Conference</i> untuk rapat teknis BPS Pusat dengan BPS Daerah.</p> <p>3.4. Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan</p>			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>Prasarana Kerja Lainnya</p> <p>Dengan indikator sasaran :</p> <p>3.4.1.Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai; dan</p> <p>3.4.2.Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai.</p> <p>4.1.Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia</p> <p>Dengan indikator sasaran :</p> <p>4.1.1.Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1; dan</p> <p>4.1.2.Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan</p>			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>nan sesuai dengan eselon;</p> <p>4.1.3.Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu; dan</p> <p>4.1.4.Persentase pegawai BPS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.</p> <p>4.2.Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS</p> <p>Indikator Sasaran:</p> <p>4.2.1.Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil audit;</p> <p>4.2.2.Jumlah fungsional Auditor;</p> <p>4.2.3.Persentase Satker yang di audit; dan</p> <p>4.2.4.Persentase SAKIP yang dievaluasi.</p>			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>4.2.5 laporan Evaluasi hasil audit</p> <p>4.3. Penataan Kelembagaan dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan <i>Good Governance</i> Dengan indikator sasaran :</p> <p>4.3.1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (Academic Paper); dan</p> <p>4.3.2. Penilaian KemenPAN-RB terhadap reformasi birokrasi BPS.</p> <p>4.4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Dengan indikator sasaran :</p> <p>4.4.1. Opini terhadap Laporan Keuangan</p>			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>BPS oleh BPK; dan</p> <p>4.4.2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (R-B);</p> <p>4.4.3. Laporan Triwulanan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke Bappenas</p>			

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas BPS 2010-2014

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja	Target				
				2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<p>Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan</p> <p>Fokus Kegiatan : <i>Sensus Penduduk (SP) 2010</i></p> <p><i>Persiapan Survei Penduduk Antar</i></p>	<p>Publikasi hasil SP 2010</p> <p>Laporan Persiapan Supas 2015</p>	<p>1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SP 2010</p> <p>1. Jumlah Laporan Persiapan</p>	1	4	4	2	-
				-	-	-	-	1

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja	Target				
				2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Sensus (Supas) 2015</i> <i>Survei Angkatan Kerja Nasional</i>	Publikasi hasil Sakernas	Supas 2015 1. Jumlah judul Publikasi Hasil Sakernas 2. <i>Response rate</i> Sakernas	3 100 %	3 100 %	3 100 %	3 100 %	3 100 %
2	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Survei Sosial Ekonomi Nasional</i>	Publikasi hasil Susenas	1. Jumlah judul Publikasi Hasil Susenas 2. <i>Response rate</i> Susenas	9 100 %	9 100 %	9 100 %	9 100 %	9 100 %
3	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Pendataan Potensi Desa (Podes)</i> <i>Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)</i>	Publikasi Hasil Podes <i>File Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan</i>	1. Jumlah Publikasi Podes 1. <i>File Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan</i>	- -	2 1 <i>File</i>	- -	- -	2 1 <i>File</i>
4	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi <u>Fokus Kegiatan :</u>							

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja	Target				
				2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional</i>	Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional (PDB)	1. Jumlah judul Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional (PDB)	1	1	1	1	1
5	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Persiapan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)</i>	Laporan Persiapan SE2016	1. Jumlah Laporan Persiapan SE2016	-	-	-	-	1
6	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga <u>Fokus Kegiatan :</u> <i>Survei Biaya Hidup (SBH 2012)</i> <i>Penyempurnaan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2012</i>	Publikasi hasil SBH 2012 Publikasi Diagram Timbangan NTP 2012	1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SBH 2012 2. <i>Response rate</i> SBH 2012 1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil Penyempurnaan NTP 2012 2. <i>Response rate</i> NTP 2012	- - -	- - -	- 100 % -	4 - 2	- - -
7	<u>Kegiatan :</u> Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman							

No	Kegiatan/Fokus Kegiatan	Output	Indikator Kinerja	Target				
				2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Fokus Kegiatan : <i>Sensus Pertanian 2013 (ST2013)</i>	Publikasi Hasil ST2013	1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil ST2013	-	-	1	2	6

Tabel 4. Alokasi Anggaran 2010-2014 Menurut Program

(Juta Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
1		2	3	4	5	6
A.	ALOKASI PROGRAM TEKNIS	3.769.067	945.641	811.881	2.359.716	1.765.763
I.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)	3.769.067	945.641	811.881	2.359.716	1.765.763
	- Sensus Penduduk 2010	3.300.000	25.000	15.187	-	-
	- Survei Biaya Hidup 2012	-	9.358	104.815	23.997	12.442
	- Survei Diagram Timbangan NTP 2012	-	15.000	122.785	33.703	13.258
	- Sensus Pertanian 2013	-	6.979	119.684	1.641.947	238.606
	- Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)	-	350.000	-	-	713.000
	- SUPAS 2015	-	-	-	-	10.000
	- Sensus Ekonomi 2016	-	-	-	-	5.000
	- Statcap Cerdas (PHLN)	-	-	-	150.000	160.000
	- Teknis Lainnya	469.067	539.304	449.410	510.069	613.457
B.	ALOKASI PROGRAM GENERIK	1.279.981	1.076.733	1.145.932	996.926	1.018.304
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	915.132	819.618	887.140	806.414	826.029
	- Statcap Cerdas (PHLN)	15.000	35.300	81.000	-	-
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	359.741	251.876	253.423	185.009	186.634
III.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS	5.109	5.238	5.369	5.503	5.640
TOTAL		5.049.048	2.022.373	1.957.813	3.356.642	2.784.067

Catatan:

*) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS belum termasuk rencana anggaran/dana remunerasi

**) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS termasuk Program Reformasi Birokrasi dengan Pinjaman Bank Dunia melalui Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics)

BAB IV PENUTUP

Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka BPS menentukan strategi-strategi penguatan data dan informasi statistik sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014, yang menempatkan pembangunan data dan informasi statistik sebagai program pendukung manajemen pembangunan nasional.

Penguatan data dan informasi statistik dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian *good governance* dan *clean government*. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

**Lampiran 1. Target Pembangunan untuk Tahun 2010-2014
BADAN PUSAT STATISTIK**

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program/ Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator						
1.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)								Badan Pusat Statistik
1.	1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1.A. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1.A.1. Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> kegiatan survei statistik 1.A.2. Presentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya	90%	90%	90%	91%	92%	Deputi MIS, Deputi Produksi, Deputi Distribusi & Jasa, Deputi Sosial, Deputi NAS
	1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1.1.1 Persentase penyajian/ <i>release</i> data dan informasi bulanan statistik ekonomi makro pada hari kerja pertama setiap bulan 1.1.2 Persentase	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			penyajian /release data Produk Domestik Bruto Triwulana n hari kerja kelima setiap bulan kedua setelah triwulan berakhir						
			1.1.3 Persentas e pemasuka n dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaa n	80%	80%	80%	82%	85%	
			1.1.4 Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi yang mempuny ai ISSN/ISB N	80	80	81	87	86	
			1.1.5 Persentas e konsumen data ekonomi yang merasa terpenuhi kebutuha n datanya	-	82%	83%	85%	87%	
	1.2. Tersediany a data dan informasi	Tersedianya data dan informasi Statistik	1.2.1 Persentas e penyajian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	/release data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester						
			1.2.2 Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> dari kegiatan statistik rumah tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			1.2.3 Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai ISSN/ISBN	23	28	26	24%	24	
			1.2.4 Persentase konsumen data sosial yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya	-	86%	87%	89%	90%	
	1.3. Mengembangkan metodologi sensus dan survei	Tersedianya metodologi Sensus dan Survei yang mutakhir	1.3.1 Persentase desain sampling untuk sensus dan survei	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			bidang ekonomi dan sosial yang tepat guna						
			1.3.2 Persentase sampel terpilih yang mewakili	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			1.3.3 Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien	2.A. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien	2.A.1. Presentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS	85%	90%	92%	94%	96%	Deputi MIS, Deputi NAS, Sestama
	2.1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik	Meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik	2.1.1 persentase penyajian /release data dan informasi Indeks Tendensi Bisnis/indeks Tendensi Konsumen pada hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				2	2	2	2	2	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kelima setiap bulan kedua setelah triwulan berkahir						
			2.1.2 Jumlah model ekonomi dan sosial yang dikemban gkan						
			2.1.3 Jumlah studi konsisten si data sosial dan data ekonomi	2	2	2	2	2	
			2.1.4 Jumlah judul publikasi indikator & analisis statistik	14	14	14	14	14	
			2.1.5 Jumlah fungsiona l statistisi dengan kualifikas i tingkat ahli	200	200	200	200	200	
	2.2 Meningkat kan hubungan dengan pengguna data	Meningkatny a hubungan dengan pengguna data	2.2.1. Banyak nya kunjunga n tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS	1 000	1 100	1 100	1 200	1 200	
			2.2.2. Persent ase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data	70%	70%	70%	75%	80%	
				70%	70%	70%	75%	80%	
				85%	90%	92%	93%	95%	
			2.2.3. Persent						

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			ase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data 2.2.4. Persent ase konsumen yang merasa puas terhadap pelayanan data BPS						
	2.3. Meningkat kan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	Meningkatny a efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	2.3.1. Jumlah pengunju ng eksternal yang mengakse s data dan informasi statistik melalui website BPS	60 000	60 000	61 000	63 000	66 000	
			2.3.2. Jumlah pengunju ng berulang yang mengg gunakan data BPS	1 860	190 0	195 0	250 0	255 0	
			2.3.3. Jumlah pengunju ng yang datang ke pelayanan statistik terpadu	180 0	180 0	190 0	200 0	210 0	
			2.3.4. Jumlah transaksi pembelian / perminta an data mentah oleh pihak	125	125	125	125	125	
				140	140	182	182	182	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			luar(<i>raw data</i>) 2.3.5. Jumlah Publikasi Elektronik yang diupload di <i>Websites</i> BPS						
	3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	3.A. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	3.A.1. Jumlah Satker yang mempunyai situs <i>web</i> yang terhubung secara <i>online</i>	484	484	507	507	507	Deputi MIS, Sestama
	3.1. Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi statistik	Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik	3.1.1. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			3.1.2. Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan teknis dan manajemen yang dihasilkan	30	30	30	30	30	
			3.1.3. Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli	10	10	10	10	10	
	Kegiatan	Output	Indikator						
	A. Pengembang	A.1. Dokumen	A.1.a. Persentas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Direktorat

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	an Metodologi Sensus dan Survei	Hasil Pemutakhiran Metodologi Sensus dan Survei yang tepat guna	e dokumen <i>desain sampling</i> untuk sensus dan survei yang tepat guna A.1.b. Persentase BPS Kabupaten/Kota yang mempunyai kerangka sampel yang mutakhir	90%	100 %	100 %	100 %	100 %	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
			A.1.c. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			A.1.d. Persentase sampel terpilih yang mewakili	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			B.1.a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>Website</i> BPS B.1.b. Jumlah pengunjung yang	60 000	60 000	61 000	63 000	66 000	Direktorat Diseminasi Statistik

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			datang ke Pelayanan Statistik Terpadu						
			B.1.c. Jumlah transaksi pembelian / perminta an data mentah oleh pihak luar	125	125	125	125	125	
			B.1.d. Jumlah Publikasi Elektronik yang diupload di Website s BPS	140	140	182	182	182	
			B.1.e. Terseleng garanya pelayanan terhadap pengguna data yang sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			B.1.f. Persentas e konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data	70%	70%	70%	75%	80%	
			B.1.g. Persentas e konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data	70%	70%	70%	75%	80%	
			B.1.h. Persentas e konsumen yang merasa	85%	90%	92%	93%	95%	

www.djpp.depkmham.go.id

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	dukun dan Ketenagakerjaan	/release data dan informasi Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan tiap semester D.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan D.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang mempunyai ISSN/ISBN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	dukun dan Ketenagakerjaan
	Fokus Kegiatan: D.A.Sensus Penduduk (SP) 2009 D.B. Persiapan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2014	D.A.1. Publikasi Sensus Penduduk 2010 D.B.1. Publikasi Survei Antar Sensus	D.A.1.a Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SP 2010 D.B.1.a. Jumlah Laporan Persiapan Supas 2015	1	4	4	2	-	
				-	-	-	-	1	
	D.C.Survei Angkatan	D.C.1. Publikasi	D.C.1.a. Jumlah judul	3	3	3	3	3	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kerja Nasional	Survei Angkatan Kerja Nasional	Publikasi Hasil Sakernas D.C.1.b. <i>Response rate</i> Sakernas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	E. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	E.1. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat	E.1.a Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> dari kegiatan Statistik Kesejahteraan Rakyat E.1.b Jumlah judul Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai ISSN/ISBN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	<u>Fokus Kegiatan :</u> E.A.Survei Sosial Ekonomi Nasional	E.A.1. Publikasi Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional	E.A.1.a. Jumlah judul Publikasi Hasil Susenas E.A.1.b. <i>Response rate</i> Susenas	9	9	9	9	9	
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	F. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	F.1. Publikasi Statistik Ketahanan Sosial	F.1.a Persentase penyajian/ <i>release data</i> dan informasi Statistik Ketahanan Sosial setiap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			tahun						
			F.1.b Persentas e pemasuka n dokumen/ <i>response</i> <i>rate</i> dari kegiatan Statistik Ketahana n Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			F.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Ketahana n Sosial yang mempuny ai ISSN/ISB N						
	<u>Fokus Kegiatan :</u> F.A.Pendataa n Potensi Desa (Podes)	F.A.1. Publika si Pendata an Potensi Desa	F.A.1.a. Jumlah Publikasi Podes	-	2	-	-	2	
	F.B.Pendataa n Program Perlindung an Sosial (PPLS)	F.B.1. <i>File</i> Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengent asan Kemiski nan	F.B.1.a <i>File</i> Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengent asan Kemiskina n	-	1 <i>File</i>	-	-	1 <i>File</i>	
	G. Penyediaan dan Pengembang an Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura	G.1. Publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikult ura, dan Perkebun	G.1.a Persentas e penyajian / <i>release</i> data dan informasi Statistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Direktor at Statistik Tanama n Pangan, Hortikult ura, dan

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	, dan Perkebunan	an	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan hari kerja pertama setiap kuartalan						Perkebunan
			G.1.b Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> dari kegiatan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	80%	80%	80%	82%	85%	
			G.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang mempunyai ISSN/ISBN	11	11	12	13	17	
	<u>Fokus Kegiatan :</u> G.A.Sensus Pertanian 2013 (ST2013)	G.A.1. Publikasi dan Laporan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2013	A.1.a. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil ST2013	-	-	1	2	6	
	H. Penyediaan dan	H.1. Publikasi Statistik	H.1.a Persentase	80%	80%	80%	82%	85%	Direktorat Statistik

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> dari kegiatan statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan						Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
			H.1.b Jumlah judul Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang mempunyai ISSN/ISBN	10	10	10	10	10	
	I. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi	I.1. Publikasi Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi	I.1.a Persentase penyajian/ <i>release</i> data dan informasi Statistik Industri pada hari kerja pertama setiap triwulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Direktorat Statistik Industri
			I.1.b Persentase pemasukan dokumen/ <i>response rate</i> dari kegiatan Statistik Industri,	80%	80%	80%	82%	85%	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pertambahan dan Penggalangan, Energi, dan Konstruksi						
			I.1.c Jumlah Judul Publikasi Statistik Industri, Pertambahan dan Penggalangan, Energi, dan Konstruksi yang mempunyai ISSN/ISBN	15	15	15	15	15	
	J. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	J.1. Publikasi Statistik Distribusi	J.1.a Persentase penyajian /release data dan informasi Statistik Distribusi pada hari kerja pertama setiap bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Direktorat Statistik Distribusi
			J.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Perdagangan Dalam Negeri dan Transportasi	80%	80%	80%	80%	85%	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<u>Fokus Kegiatan :</u>		J.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Distribusi yang mempunyai ISSN/ISBN	12	12	12	12	12	
	J.A. Persiapan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)	J.A.1. Laporan Persiapan SE2016	A.1.a. Jumlah Laporan Persiapan SE2016	-	-	-	-	1	
	K. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	K.1. Publikasi Statistik Harga	K1.a Persentase penyajian /release data dan informasi Statistik Harga pada hari kerja pertama setiap bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Direktor at Statistik Harga
			K.1.b Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Harga	80%	80%	80%	80%	85%	
			K.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Harga yang mempunyai ISSN/ISBN	8	8	8	13	8	
	<u>Fokus Kegiatan :</u> K.A. Survei Biaya	K.A.1. Publikasi	K.A.1.a. Jumlah	-	-	-	4	-	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Hidup (SBH 2012)	si Survei Biaya Hidup	judul Publikasi dan Laporan Hasil SBH 2012 K.A.1.b. Response rate SBH 2012	-	-	100 %	-	-	
	K.B.Penyemp urnaan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2011	K.B.1. Publika si penyem purnaa n Diagram Timban g Nilai Tukar Petani	K.B.1.a. Jumlah judul Publikas i dan Laporan Hasil Penyemp urnaan NTP 2012 K.B.1.b. Response rate NTP 2012	-	-	-	2	-	
	L. Penyediaan dan Pengembang an Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	L.1. Publikasi Statistik Keuangan , Teknologi Informasi , dan Pariwisat a	L.1.a Persentas e penyajian /release data dan informasi Statistik Keuangan , Teknologi Informasi dan Pariwisata pada hari kerja pertama setiap bulan L.1.b Persentas e pemasuka n dokumen/ response rate dari kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Direktor at Statistik Keuanga n, Teknolog i Informas i, dan Pariwisat a
				80%	80%	80%	82%	85%	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Statistik Keuangan , Teknologi Informasi dan Pariwisata L.1.c Jumlah judul Publikasi Statistik Keuangan , Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang mempuny ai ISSN/ISB N	9	9	9	9	9	
	M. Penyediaan dan Pengembang an Statistik Neraca Produksi	M.1. Publikasi Statistik Neraca Produksi	M.1.a Persentas e Penyajian /release data dan informasi Neraca Produksi hari kerja ke 5 pada bulan kedua setelah triwulan berakhir M.1.b Persentas e pemasuka n dokumen/ response rate dari kegiatan Statistik Neraca Produksi M.1.c Jumlah judul	100 % 80%	100 % 80%	100 % 80%	100 % 82%	100 % 85%	Direktor at Neraca Produksi

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fokus Kegiatan M.A.Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional	M.A.1.Publikasi Pendapatan Nasional	Publikasi Neraca Produksi yang mempunyai ISSN/ISBN A.1.a. Jumlah judul Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Pendapatan Nasional (PDB)	1	1	1	1	1	
	N. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	N.1. Publikasi Neraca Pengeluaran	N.1.a Persentase penyajian / <i>release</i> data dan informasi Neraca Pengeluaran hari kerja ke 5 pada bulan kedua setelah triwulan berakhir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Direktorat Neraca Pengeluaran
			N.1.b Persentase pemasukan dokumen / <i>response rate</i> dari kegiatan Neraca Pengeluaran	80%	80%	80%	82%	85%	
			N.1.c Jumlah judul Publikasi	6	6	6	6	6	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	O. Pengembang an dan Analisis Statistik	O.1. Publikasi Pengemb a-ngan dan Analisis Statistik	Neraca Pengeluar an yang mempuny ai ISSN/ISB N						
			O.1.a Jumlah judul Publikasi Analisis Statistik	3	3	3	3	3	Direktor at Analisis dan Pengemb a-ngan Statistik
			O.1.bJumlah judul Publikasi Konsisten si Statistik	2	2	2	2	2	
			O.1.cJumlah judul Publikasi Indikator Statistik	7	7	7	7	7	
			O.1.dJumlah judul Publikasi Pengemba ngan Model Statistik	2	2	2	2	2	
			O.1.eJumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli	200	200	200	200	200	
	Program/ Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator						
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS								Badan Pusat Statistik
3.	Penguatan Teknologi Informasi dan	3.A. Penguata n Teknologi Informasi	3.A.1. Jumlah Satker yang mempuny ai situs	484	484	507	507	507	Sestama, BPS Provinsi

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Komunikasi serta Sarana Kerja	dan Komunikasi serta Sarana Kerja	web yang terhubung secara online						
	3.1 Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya	Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana TIK serta Sarana dan Prasarana Kerja Lainnya	3.2.3. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai 3.2.4. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya yang memadai	85% 80%	87% 82%	89% 84%	91% 86%	93% 88%	
	Kegiatan	Output	Indikator						
	A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Serta Operasional Perkantoran Lainnya	1. Kendaraan Bermotor 2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Gedung/ Bangunan	1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya di BPS Pusat 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai di BPS Pusat	90% 95%	95% 95%	96% 96%	96% 98%	96% 98%	Biro Umum
	B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS	1. Kendaraan Bermotor 2. Perangkat Pengolah Data dan	1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya kantor BPS	74%	74%	77%	80%	83%	BPS Provinsi

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Provinsi	Komunikasi 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Gedung/ Bangunan	Provinsi/ Kabupaten/ Kota 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai di BPS Provinsi/ Kabupaten/ Kota	77%	81%	83%	85%	89%	
	Program/ Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator						
3.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS								Badan Pusat Statistik
	4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan	4.A. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan	4.A.1. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 4.A.2. Penilaian Kementerian-RB terhadap reformasi birokrasi BPS	65% 55	65% 60	70% 65	75% 70	80% 73	Sestama
	4.1 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia	4.1.1. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma	65%	65%	70%	75%	80%	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			IV atau Srata I						
			4.1.2. Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon	90%	91,5 %	91,5 %	91,5 %	91,5 %	
			4.1.3. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	2000	2100	2100	2100	2100	
			4.1.4. Persentase pegawai BPS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	-	35%	35%	35%	35%	
	4.3 Penataan Kelembagaan dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Terwujudnya <i>Good Governance</i> pada Reformasi Birokrasi BPS	4.3.1. Jumlah peraturan perundangan yang diselesaikan (<i>Academic Paper</i>)	2	2	2	2	2	
			4.3.2. Penilaian Kempena n-RB terhadap reformasi birokrasi BPS	55	60	65	70	73	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	4.4 Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Meningkatnya akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	4.4.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK 4.4.2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemenpan- RB 4.4.3. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ke Bappenas	WDP 55 4	WDP 60 4	WTP 65 4	WTP 70 4	WTP 73 4	
	4.5 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Prasarana Kerja dan Prasarana Kerja Lainnya	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana TIK serta Prasarana Kerja Lainnya	4.5.1. Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi yang baik 4.5.2 Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik	100 % 85%	100 % 90%	100 % 90%	100 % 95%	100 % 95%	
	Kegiatan	Output	Indikator						
	A. Penyusunan , Pengembangan, dan Evaluasi Program	A.1. Dokumen Perencanaan	A.1.a. Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang	484	484	484	484	484	Biro Bina Program

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Anggaran		disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenan g A.1.b. Penilaian Sistem Akuntabili tas Kinerja BPS oleh Kemen PAN dan RB	55	60	65	70	73	
	B. Pengelolaan dan Pengembang an Administrasi Keuangan	B.1. Layanan Perkantoran B.2. Layanan Administrasi Keuangan	B.1.a. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK B.2.a. Jumlah laporan kegiatan Administrasi Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan
	C. Pengelolaan dan Pengembang an Administrasi Kepegawaia n	C.1. Layanan Administrasi Kepegawaian	C.1.a. Jumlah pegawai yang memangk u jabatan fungsional tertentu C.1.b. Persentas e pegawai berpendid ikan minimal Diploma IV/Strata 1 C.1.c. Persentas e pemuktah iran data sistem	2 000 65% 100 %	2 100 65% 100 %	2 100 70% 100 %	2 100 75% 100 %	2 100 80% 100 %	Biro Kepegaw aian

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	D. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	D.1. Layanan Kehumasan, Hukum, dan Hubungan Kelambagaan	informasi kepegawaian D.1.a. Banyaknya penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS D.1.b. Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS D.1.c. Jumlah peraturan perundangan yang diselesaikan (Academic Paper)	18 1 000 2	18 1 100 2	18 1 100 2	18 1 200 2	18 1 200 2	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
	E. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara BPS	E.1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bps	E.1.a. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan E.1.b. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional statistisi dan pranata komputer	872 400	872 400	872 400	872 400	872 400	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	F. Pelayanan Internal Perkantoran dan Kepegawaian	F.1. Satker yang Telah Menyelenggarakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi	F.1.a. Jumlah dokumen reformasi birokrasi	1	1	1	1	1	Biro Kepegawaian
	G. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	G.1. Layanan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	G.1.a. Jumlah mahasiswa yang lulus program pendidikan D IV	289	310	310	500	500	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
			G.1.b. Jumlah penelitian dosen	2	2	2	2	2	
	H. Dukungan Manajemen BPS Lainnya	H.1. Layanan Perkantoran	H.1.a. Persentase kondisi sarana teknologi informasi dan komunikasi yang baik	80%	82%	83%	85%	88%	Biro Umum
		H.2. Layanan Penatausahaan Bmn	H.2.a. Persentase sarana dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi yang baik	85%	90%	90%	95%	95%	
			H.2.b. Persentase satker yang melaksanakan implementasi SIMAK-BMN dengan kategori baik	90%	90%	90%	92%	95%	

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit
				2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program/ Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator						
4.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS 4.2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	4.2.A Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	4.2.1. Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil audit. 4.2.2. Jumlah fungsional Auditor 4.2.3. Persentase Satker yang diaudit 4.2.3. Persentase Sakip yang dievaluasi	6 10 31% 7%	6 20 40% 7%	6 27 21% 97%	6 55 49% 96%	6 55 49% 96%	Badan Pusat Statistik Inspektur Utama
	Kegiatan	Output	Indikator						
	A. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	A.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Wilayah I	A.1.a Jumlah laporan hasil audit Wilayah I A.1.b Jumlah evaluasi hasil audit Wilayah I A.1.c Jumlah laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil audit Wilayah I	62 LHA 1 2	62 LHA 1 2	62 LHA 1 2	62L HA 1 2	62 LHA 1 2	Inspektorat Wilayah I

No	Program/ Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	B. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	B.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Wilayah II	B.1.a Jumlah laporan hasil audit Wilayah II	72 LHA	72 LHA	72 LHA	72 LHA	72 LHA	Inspekto rat Wilayah II
			B.1.b Jumlah evaluasi hasil audit Wilayah II	1	1	1	1	1	
			B.1.c Laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil audit Wilayah II	2	2	2	2	2	
	C. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	C.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Wilayah III	C.1.a Jumlah laporan hasil audit Wilayah III	58 LHA	58 LHA	58 LHA	58 LHA	58 LHA	Inspekto rat Wilayah III
			C.1.b Jumlah evaluasi hasil audit Wilayah III	1	1	1	1	1	
			C.1.c Laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil audit Wilayah III	2	2	2	2	2	

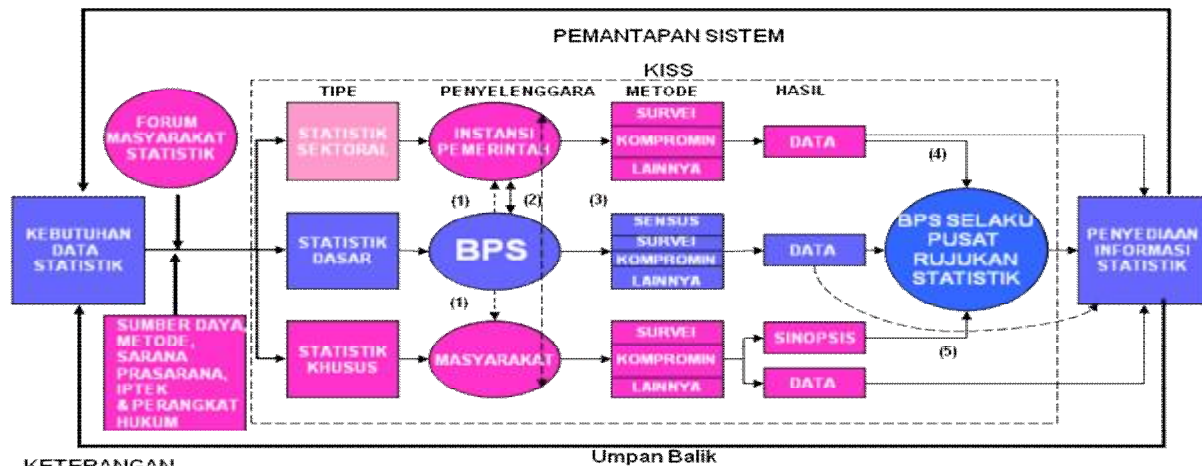
**Lampiran 2. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014
BADAN PUSAT STATISTIK**

(000 Rp)

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
(1)		2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
A.	PROGRAM TEKNIS	3.769.066.829	945.640.948	811.881.491	2.359.716.382	1.765.763.821
I.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)	3.769.066.829	945.640.948	811.881.491	2.359.716.382	1.765.763.821
1	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	752.522	6.057.190	7.834.613	27.040.033	7.113.858
2	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	9.267.980	5.495.062	6.044.568	6.649.025	7.313.928
3	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	5.704.004	6.925.636	7.062.917	7.511.631	7.452.938
4	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	3.356.231.465	85.742.408	77.611.322	64.173.437	75.948.619
	- Sensus Penduduk 2010	3.300.000.000	25.000.000	15.187.128	-	-
	- Survei Penduduk Antar Sensus	-	-	-	-	10.000.000
5	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	149.072.206	151.562.390	154.889.726	158.631.268	162.135.870
6	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	3.382.184	461.689.082	7.330.712	8.176.397	833.307.238
	- Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS)	-	350.000.000	-	-	713.000.000
7	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	84.864.720	43.800.336	141.524.315	1.290.250.411	245.479.718
	- Sensus Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	3.288.809	100.000.000	1.247.687.988	201.853.234
8	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	11.858.248	14.938.154	31.213.336	406.076.569	48.866.008
	- Sensus Pertanian Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	-	3.690.022	19.684.000	394.259.000	36.753.000
9	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi.	29.213.359	25.431.717	26.322.033	27.260.060	28.249.535
10	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	8.716.211	9.068.020	9.284.901	9.507.007	12.650.337
	- Sensus Ekonomi 2016	-	-	-	-	5.000.000
11	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	27.354.863	52.608.618	256.698.927	87.675.748	56.581.958
	- Survei Biaya Hidup 2012	-	9.358.189	104.814.655	23.996.673	12.441.750
	- Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani 2012	-	15.000.000	122.785.345	33.703.327	13.258.250
12	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata	57.311.038	16.371.295	17.857.966	18.876.052	20.001.142
13	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	14.756.025	26.065.642	27.525.233	24.738.978	25.608.051
14	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	7.279.685	17.968.067	18.266.044	18.571.470	18.884.532
15	Pengembangan dan Analisis Statistik	3.302.319	22.267.333	22.414.879	204.578.296	216.883.090
B.	PROGRAM GENERIK	1.279.981.391	1.076.732.582	1.145.931.800	1.178.374.592	1.211.898.247

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya	915.131.874	819.618.468	887.139.832	987.862.826	1.019.623.686
1	Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program Kegiatan dan Anggaran	27.126.130	23.247.971	23.500.930	24.455.175	25.854.280
2	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	83.522.165	86.078.707	86.300.523	87.600.448	90.568.712
3	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	3.858.314	6.988.820	6.881.299	8.100.076	8.764.511
4	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat, dan Hukum	3.197.680	3.393.151	3.500.149	3.825.267	3.554.047
5	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	14.155.495	15.851.420	16.286.355	16.788.730	17.297.545
6	Pelayanan Internal Perkantoran dan Kepegawaian	18.826.529	43.557.900	98.517.690	-	-
7	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	13.178.700	13.126.592	13.587.339	14.009.956	14.553.508
8	Operasional Perkantoran lainnya (Kegiatan Lintas Biro)	31.755.643	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
9	Biro Umum (di luar PSPA Pusat)	1.779.770	1.824.264	1.869.871	1.916.618	1.964.533
10	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	229.508.754	135.418.258	137.327.913	140.739.222	144.253.188
11	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten/Kota	488.222.694	470.131.385	479.367.764	488.977.876	499.218.957
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	359.740.885	251.876.365	253.423.274	185.008.856	186.634.077
1	Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Pusat	162.526.241	82.847.847	83.169.043	33.498.269	33.835.726
2	Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota	197.214.644	169.028.518	170.254.230	151.510.586	152.798.351
III.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Aparatur BPS (P2A2)	5.108.632	5.237.750	5.368.694	5.502.911	5.640.484
1	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	1.702.877	1.745.917	1.789.565	1.834.304	1.880.161
2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	1.702.877	1.745.917	1.789.565	1.834.304	1.880.161
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	1.702.877	1.745.917	1.789.565	1.834.304	1.880.161
TOTAL		5.049.048.220	2.022.373.530	1.957.813.291	3.356.641.515	2.784.067.663

Lampiran 3. Sistem Statistik Nasional



KETERANGAN

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi.

KOMPROMIN: Kompilasi Produk Administrasi.

- 1). BPS mengkoordinasikan Penyelenggaraan Statistik
- 2). Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan Rekomendasi
- 3). Instansi Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama
- 4). Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik
- 5). Masyarakat menyerahkan Sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik

Lampiran 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pembangunan nasional, maka Badan Pusat Statistik perlu menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun ke depan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Rencana Strategis pada Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut sebagai Renstra BPS Tahun 2010-2014, memuat gambaran umum situasi perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

- (1) Renstra BPS Tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 bidang statistik dan digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah bidang statistik selama

- (2) Renstra BPS Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra pada masing-masing instansi vertikal BPS tersebut.
- (3) Penyusunan Renstra pada instansi vertikal BPS Tahun 2010-2014 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

Renstra BPS Tahun 2010-2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Februari 2010

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Dr. RUSMAN HERIAWAN
NIP. 19511104 197403 1 001

**Lampiran 5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014**



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan dalam tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

-2-

9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014.
- KESATU : Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014 setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Juli 2011
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Dr. RUSMAN HERIAWAN